

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arief, A. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Freddy Ade Putra Pueba, dkk, *Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.
- Karden Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djembatan, 2009.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017).
- Singarimbun, Masri. dan sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah dalam Persepektif Lingkungan, Nilai dan Sumber daya*. Jakarta: Djembatan, tt.
- Kaho, Josep Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Tety Fajrul 'Aini dan Nawiyanto, "Dari Hutan Produksi ke Kawasan Konservasi: Kajian Tentang Kawasan Gunung Ciremai Tahun 1978-2014", *Historia*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2021): 73-85.

Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Biah fi al-Syari'ah al-Islam*, terj. Abdullah Hakam Shah, *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

Departemen Kehutanan. *Taman Nasional di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Konservasi Alam. 2012.

## Jurnal

Arhamullah, Abdi dan Fatmawati, "Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Gowa", *Journal of Public Policy and Management*, Vol. 4, No.1 (Mei, 2022): 18-23

Djambur, dkk, "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah", *e Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 2 (Februari, 2017), 26-35.

Fajarwati, Winda Noer. "Evaluasi Potensi Wisata Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) untuk Ekowisata di Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka" (2017): 4.

Habibi, Fikri. "Transisi Peralihan Kewenangan Bidang Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Banten", *Jurnal Sawala*, 5(2) (Oktober, 2017): 11-22.

Kemas Abdul Somad, "Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah Hukum di Kabupaten Muara Jambi", *Legalitas*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2014): 94-117.

Khotimah, Helfia Noor. Ilham Adhya dan Yayan Hendrayana, "Inventarisasi Tanaman Rehabilitasi di Wisata Alam Pasir Batang Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai", *Jurnal Wanaraksa*, Vol. 13, No. 1 (Mei, 2019): 1-9.

Nazwa Ananda dan Anis Fuadah Zuhri, “Menjaga Kelestarian Hutan dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik MI/SD”, *el-Banar*, Vol. 3, No.1 (April, 2020), 35-46.

Wahid. A.M. Yunus dan Naswar Bohari, “Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan” (2015): 61.

### **Skripsi**

La Ode Bariun, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan”, (Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015).

Rahmat, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Hutan Lindung di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 5.

Wahyuni, Pengembangan Koleksi Jurnal studi Kasus di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Yogyakarta (2013), 20

Yani, Rahma. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu” (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 30.

Putri Handayani Azhar, Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Melindungi Hak Warga untuk Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat (Analisis Tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan di Provinsi Sumatera Selatan), *Skripsi* (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijawa, 2020)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2004

**Internet**

Data dan Informasi (statistik kementerian), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/*Directorate General of Forestry Planning*, [www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)

